

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Keberlangsungan Pemilu di Indonesia merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum dengan asas luber (langsung umum, bebas, rahasia) dan asas jurdil (jujur dan adil) diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dalam pemerintahan atau wakil daerah/kepala daerah. Partisipasi politik merupakan bagian penting dari negara demokrasi. Hal ini karena demokrasi sebagai sistem politik yang berusaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan salah satu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu sangat penting yang mana partisipasi masyarakat akan menentukan siapa yang menjadi Kepala Daerah, siapa yang akan menjalankan pemerintahan sesuai dengan aspirasi rakyatnya.

Pendidikan Kewarganegaraan seperti yang dikemukakan oleh Cholisin (2000) bertujuan untuk menggambarkan dan membina warga negara yang baik, dalam arti memahami dan mampu menjalankan perannya sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam membangun negara yang demokratis, manusiawi, dan berkeadilan sosial, atau di era reformasinya sekarang dikatakan mampu menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya..

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945 tentang Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia, pasal-pasal ini dirancang untuk memungkinkan setiap orang berkontribusi dalam penciptaan masyarakat yang demokratis, humanistik, dan adil secara sosial. Sehingga, yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk diandalkan oleh bangsa dan negara antara lain adalah kemampuan untuk: a) berpartisipasi dalam mewujudkan negara demokrasi (Demokrasi Politik), yang dilakukan melalui salah satu unsur, Pemilihan Umum; b) berpartisipasi dalam perwujudan kemanusiaan (sosial demokrasi); c) ikut serta dalam mewujudkan keadilan sosial. Plato berpendapat bahwa tindakan politik adalah tindakan yang berhubungan dengan pemerintahan, menurut Fadillah Putra (2004:200) pemilihan umum memberikan wadah bagi calon-calon dalam kontestasi politik untuk memperoleh kekuatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan sebagai penyelenggara pelayanan sosial mensejahterakan melalui berbagai program. (Nasution, 2017).

Dalam UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa: Penyelenggara Pemilihan Umum adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat". Artinya adalah bahwa ketentuan tersebut berarti pemilihan harus dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak, yang menjamin prinsip kedaulatan masyarakat, seperti dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diberlangsungkan (Sodikin, 2014). Perilaku politik

mencakup reaksi internal, seperti ide, sikap, dan keyakinan, serta tindakan tertentu yaitu pemungutan suara, protes, dan lobi. Perilaku memilih individu dalam kegiatan pemilu disebut dengan konsep perilaku pemilih. Partisipasi warga negara dalam keikutsertaanya melalui proses pemilu adalah kemampuan atau keputusan politik yang dimiliki oleh seseorang ditentukan oleh perilaku, sikap, dan pendapat politik dari seseorang tersebut.

Sejak reformasi, angka partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan tidak pernah mencapai persentase 60%. Pada tahun 2015 angka partisipasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan hanya sebesar 25,38% (Nasution, Faiz Albar, 2020). Angka partisipasi pemilih Kota Medan yang hanya 25,38% saat itu bukan hanya menjadi sejarah partisipasi pemilih terendah di Kota Medan dan Sumatera Utara, tetapi menjadi partisipasi terendah secara nasional di Pilkada serentak 2015. Oleh karena itu, dilakukanlah evaluasi terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada 2015 lalu oleh Panitia Pemilihan Umum Kota Medan untuk melihat faktor yang menjadi pengaruh dari rendahnya partisipasi masyarakat Kota Medan pada 2015 lalu. Hasil evaluasi yang dilakukan Panitia Pemilihan Umum tersebut menunjukkan bahwa rendahnya angka partisipasi pemilih di Kota Medan tahun 2015 lalu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa teknis penyelenggara pemilu, seperti: daftar pemilih tetap belum diperbaharui, yang akan mempengaruhi pemetaan TPS yang digunakan untuk alokasi C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih), kinerja petugas pemutakhiran atau pembaharuan data para pemilih, dan faktor-faktor lain, yaitu: calon angka, peran partai politik, dan ketidakpercayaan masyarakat

terhadap hasil Pilkada. Oleh karena itu, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu sangat menentukan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilihnya.

Dalam (Budiman, 2020) menjelaskan bahwa pemilihan umum Kepala Daerah di Kota Medan dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini sampai terjadi karena pertama, Pemilihan Walikota Medan terdapat pasangan calon yang merupakan anak menantu dari Presiden Republik Indonesia, kedua karena tingkat partisipasi pemilihan di Pilkada Medan yang perlu ditingkatkan. Seperti yang dilansir dari (Molana, news.detik.com, 2020) bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara hasilnya, terdapat peningkatan dalam aspek tingkat partisipasi pemilih dari Pilkada Medan sebelumnya yaitu menjadi 46% meskipun tidak mencapai partisipasi target nasional, tetapi dibandingkan pilkada 2015 sudah lebih baik.

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Medan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Adapun kedua pasangan tersebut adalah pasangan calon dengan nomor urut 1. Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si dan H. Salman Alfarisi, Lc, MA dengan perolehan suara sebanyak 342.580 yang diusung oleh dua partai politik yaitu Partai Demokrat dan PKS. Pasangan calon dengan nomor urut 2 yaitu Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Aulia Rachman dengan perolehan suara sebanyak 393.327 yang diusung oleh sembilan partai politik yaitu PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PPP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI.

Melalui data dari KPU Kota Medan terdapat 21 Kecamatan di Kota Medan dengan jumlah pemilih pada pemilihan Walikota Medan ada sebanyak 1.636.611 jiwa orang sudah termasuk kepada pemilih disabilitas, akan tetapi banyaknya jumlah pemilih tersebut tentunya tidak semua menggunakan hak suara mereka, masih berdasarkan data dari KPU Kota Medan bahwa penduduk yang menggunakan hak suaranya sebesar 749.500 jiwa orang, masih dikurangkan dengan penggunaan surat suara pemilih yang rusak maka jumlah suara yang ditetapkan pada pemilihan Walikota Medan sebesar 735.907 surat suara yang masuk kedalam rekapitulasi pemilihan. Dimana jumlah suara laki-laki yang masuk adalah sebanyak 343.290 surat suara dan perempuan sebanyak 406.210 surat suara. Berdasarkan data ini jumlah suara pemilihan Walikota Medan lebih didominasi oleh pemilih perempuan dibandingkan dengan pemilih laki-laki.

Masih berdasarkan data dari KPU Kota Medan, Kecamatan Medan Denai memiliki DPT sebanyak 106.498 jiwa orang dan yang menggunakan hak suaranya sebanyak 48.975 jiwa orang. Dimana pemilih laki-laki sebanyak 22.536 jiwa orang dan pemilih perempuan sebanyak 26.439 jiwa orang. Kecamatan Medan Denai ini memiliki 6 Kelurahan dimana Kelurahan Binjai tercatat sebagai Kelurahan yang jumlah DPT nya lebih banyak dibandingkan dengan Kelurahan lainnya. Berdasarkan data dari Kelurahan Binjai tercatat sebanyak 36.770 jiwa orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap, dengan pemilih laki-laki sebanyak 17.940 jiwa orang dan pemilih perempuan sebanyak 18.830 jiwa orang. Melalui data ini diketahui bahwa pemilih perempuan lebih mendominasi dari pada pemilih laki-lakinya. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kelurahan lain yang

tidak mencapai sebanyak jumlah DPT di Kelurahan Binjai ini, maka dari itu Kelurahan Binjai ini sangat mendominasi pemilih perempuan di Kecamatan Medan Denai.

Dalam pemilihan umum, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Pemberian suara adalah salah satu cara untuk mencapai kedaulatan yang dilakukan secara langsung, bebas, jujur, dan rahasia dalam mendukung hak rakyat untuk membentuk pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta memungkinkan perempuan untuk memilih dengan bebas seorang pemimpin daerah yang tepat. Pemilihan kepala daerah dapat mencapai kesetaraan gender dalam politik dengan memilih laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama. Pemilih perempuan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor dalam mengambil keputusan, salah satunya adalah budaya patriarki.

Sebagaimana dalam penelitian Jannah (2015), perilaku pemilih perempuan adalah:

"Perilaku pemilih perempuan sering dipengaruhi oleh pemikiran yang menginginkan hal-hal mudah, sempit, instan dan bahkan ketidaktahuan mereka terhadap perkembangan politik. Mereka menganggap bahwa pilihan politik mereka tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, pemilih perempuan akan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam menentukan pilihan-pilihannya, seperti pengaruh budaya patriarki yang ada, ini terjadi karena budaya politik mereka lebih mengarah sesuai dengan pilihan suami atau mengikuti keputusan pilihan politik ayah mereka, dan rendahnya kepercayaan mereka terhadap kepada pemerintah.

Setelah melakukan observasi di Kelurahan Binjai, terdapat beberapa temuan yang mempengaruhi pemilih perempuan pada pemilihan Walikota Medan tahun 2020 yaitu: adanya pengaruh dari peran kelompok sosial terhadap perilaku

pemilih perempuan di Kelurahan Binjai. Berdasarkan hasil penemuan ketika melakukan observasi, pemilih perempuan di Kelurahan Binjai masih cukup bergantung dengan kecenderungan memilih sama dengan politik keluarga dan masih erat dengan adanya pengaruh kelompok masyarakat. Pemilih perempuan di Kelurahan Binjai ini juga dalam menentukan pilihannya tidak melihat faktor seperti usia sebagai dasar dalam menentukan pilihannya karena menurut beberapa pemilih perempuan di Kelurahan ini seorang wakil yang akan memimpin mereka keberhasilannya itu tidak dapat diukur dari faktor umur atau usia, melainkan dengan mempertimbangkan hasil kinerja, kualitas, kepribadian, dan fiqur kandidat dari setiap calon yang ada. Menurut mereka, bahwa belum tentu kandidat yang lebih tua usianya dan memiliki banyak pengalaman dalam pemerintahan begitupun juga sebaliknya, belum tentu juga kandidat Walikota dan Wakil Walikota yang muda lebih prima dari kandidat atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang tua.

Pemilih perempuan di Kelurahan Binjai ini menjadikan faktor kandidat menjadi pengaruh dalam menentukan pilihan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan menjatuhkan pilihannya atas dasar pertimbangan terhadap figur yang diyakini lebih baik dibandingkan dengan figur/kandidat lainnya. Maka dari itu, ternyata sosok seseorang calon Walikota dan Wakil Walikota yang layak haruslah calon yang benar-benar memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, calon yang memiliki kebijakan yang baik diyakini akan disambut positif dan berpengaruh terhadap perilaku pemilih perempuan di Kelurahan Binjai.

Secara umum pemilih perempuan yang ada di Kelurahan Binjai ini tergolong sangat antusias ketika mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 dengan melewati berbagai tahapan. Tingginya partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan Binjai yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, didorong oleh adanya kesadaran para pemilih akan haknya sebagai warga Negara Indonesia yang mengharapkan bahwa melalui pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota kali ini betul-betul akan dapat melahirkan pemimpin yang nantinya mampu membawa Kota Medan ini kearah yang lebih baik lagi.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis akan meneliti tentang perilaku pemilih perempuan di salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Denai yaitu Kelurahan Binjai dikarenakan Kecamatan Medan Denai ini termasuk salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah pemilih perempuan terbanyak jika dibandingkan dari beberapa Kecamatan yang ada di Kota Medan dan Kelurahan Binjai yang merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Medan Denai ini menjadi lokasi yang sangat baik untuk diteliti dikarenakan dari enam Kelurahan di Kecamatan Medan Denai, Kelurahan ini memiliki DPT perempuan yang mendominasi. Sehingga berdasarkan hal ini hal yang ingin penulis teliti adalah tentang *Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Medan 2020 Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.*

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, beberapa permasalahan yang dapat ditarik dari perilaku memilih wanita dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Medan tahun 2020 di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, yaitu:

1. Tingkat partisipasi politik rakyat Kota Medan relatif rendah dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 yang tidak hanya sejarah partisipasi pemilih terendah di kota Medan dan Sumatra Utara saja, akan tetapi merupakan partisipasi terendah pada 2015 secara nasional.
2. Tingkat partisipasi pemilih Kota Medan dalam pemilihan walikota 2020 telah meningkat, meskipun tidak mencapai target nasional. Di mana pemilih perempuan lebih banyak dari pemilih Laki-laki dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.
3. Pemilih Perempuan di Kelurahan Binjai masih cukup bergantung pada pengaruh dari politik keluarga mereka serta masih ada juga pengaruh kelompok masyarakat.
4. Perilaku pemilih perempuan di Kelurahan Binjai dalam menentukan pilihannya pada pemilu Walikota dan Wakil Walikota melihat sosok figur dari kandidat dengan menyakini bahwa sosok figur yang mereka inginkan harus membawa perubahan bagi Kota Medan selama lima tahun Kedepannya.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Adapun dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang telah disebutkan pada latar belakang masalah dengan maksud agar penelitian lebih terfokus pada permasalahan utama yang hendak diteliti, yaitu: Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Medan 2020 Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi pokok masalah adalah: Bagaimana Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Medan 2020 Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: Perilaku Pemilih Perempuan Dalam Pemilihan Walikota Medan 2020 Di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan dan menambah ilmu pengetahuan bagi semua masyarakat bagi dari setiap kalangan manapun dan memberikan deskripsi pengetahuan tentang perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan umum di Kota Medan.

## **b. Manfaat Praktis**

Dengan Melakukan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan-kalangan seperti :

### 1. Bagi Penulis

Kepada penulis agar dapat meningkatkan pengetahuan penulis sebagai hasil dari apa yang telah diperoleh di perguruan tinggi dalam menulis makalah ilmiah seperti penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara ilmiah yang berguna untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.

### 2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi mahasiswa tentang perilaku politik dalam pemilihan walikota tahun 2020 terutama di Kota Medan dan dapat digunakan sebagai referensi atau referensi dalam kegiatan penelitian.

### 3. Bagi Pemerintah

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan input positif kepada pemerintah, terutama mengenai perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan walikota untuk menjadi lebih baik di masa depan.

### 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk informasi peningkatan informasi kepada masyarakat di Indonesia, dalam hal praktik perilaku pemilih perempuan dalam pemilihan umum. Khusus untuk pemilih perempuan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum.